



LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2022

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**2023**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana amanat Inpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910.05/Kep.360-Bappeda/2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggambarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini diharapkan SKPD senantiasa melakukan perbaikan dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2021 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 April 2021 tentang Laporan hasil Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan



(SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2021 mendapatkan penilaian sebesar 80,55 (dengan kategori A-Memuaskan) meningkat dibandingkan tahun 2020 kategori BB dengan nilai 75,92, tahun 2019 sebesar 72,71 dan 2018 sebesar 70,32.

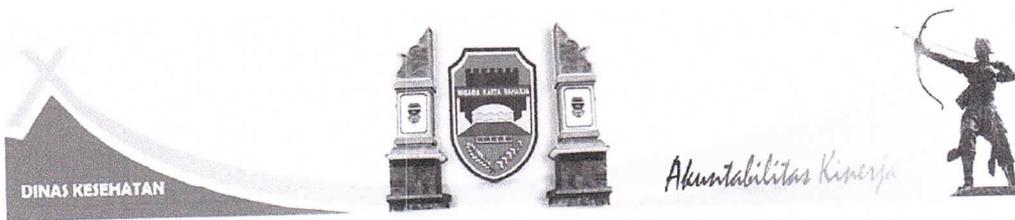
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta secara umum telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2021, dimana telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran tujuan strategis, 2 sasaran utama dan 7 indikator sasaran program. Berdasarkan hasil evaluasi Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 9 indikator (90%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu 1 indikator sasaran terkait dengan kasus kematian ibu yang masih tinggi. Penyebab indikator yang belum mencapai disebabkan sangat kompleksnya penanganan kasus kematian ibu, disamping masih adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya refokusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Selain itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat, anggaran yang belum memadai serta data pelaporan yang belum optimal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan. Melalui tujuan organisasi yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi meningkatkan umur harapan hidup yang sehat dan produktif sehingga dapat mendukung



meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa. Dimana diharapkan setiap penduduk di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan dengan strategi meningkatkan Ketersediaan Kualitas Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Lingkungan serta pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan pada tahun mendatang harus tetap diupayakan kepada usaha-usaha untuk menurunkan AKI dan AKB yang angkanya masih tinggi. Kekurangan dana kegiatan diharapkan dapat ditanggulangi melalui upaya mobilisasi dana seperti menjalin kemitraan dengan Badan Nasional maupun International melalui peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Di tingkat Kabupaten jalinan kemitraan juga perlu terus dikembangkan tidak hanya dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektoral, tetapi juga dengan mengembangkan peran serta aktif masyarakat melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Selain itu, perlu dipertimbangkan pula peran swasta dan kelompok potensial di tingkat masyarakat agar berperan secara aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan sesuai bidangnya masing-masing sebagai wujud menuju kemandirian masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan selama tahun 2022, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kesehatan Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Purwakarta, 9 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,**  
  
**dr. H. DEMI DARMAWAN, MARS**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197509132006041008



## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I- 1
1.1. Latar Belakang	I- 1
1.2. Dasar Hukum	I- 2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	I- 5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	I- 7
1.5. Struktur Organisasi	I- 9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	II- 1
2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan Dinas Kesehatan	II- 1
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II- 3
2.3. Prioritas daerah	II-12
2.4. Penetapan Kinerja	II-27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	III- 1
3.1. Kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja	III- 1
3.2. Evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja	III- 5
Ringkasan Kinerja	III- 6
Rincian Kinerja	III- 8
3.3. Realisasi Anggaran	III-61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	IV- 1
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dengan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP tersebut meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja; dan review dan evaluasi kinerja.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah urusan kesehatan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIP sejak tahun 2002 berdasarkan pada : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/ IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun



berdasarkan pedoman yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
20. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910.05/Kep.360-bappeda/2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

### **1.3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Khusus dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan terbagi kedalam kelompok Urusan Utama dan Urusan Pendukung. Urusan Utama diartikan sebagai urusan pemerintahan yang menopang langsung terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Langkah Menuju Purwakarta Digjaya, sedangkan Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Langkah Mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 maka kesehatan berada pada misi pertama yaitu **Misi I: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**. Hal



ini menjadikan kesehatan merupakan salah satu urusan utama Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun kedepan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 maka yang menjadi urusan kesehatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan obat esensial, program dan generik buffer stock
- b) Peningkatan pengawasan obat dan makanan
- c) Pemberantasan penyakit menular
- d) Meningkatkan status gizi masyarakat (bumil, bayi dan balita)
- e) Promosi kesehatan
- f) Upaya kesehatan berbasis masyarakat
- g) Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- i) Penyehatan air dan pengamanan Limbah
- j) Penyehatan lingkungan
- k) Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya
- l) Penyediaan sarana dan prasarana menuju desa siaga
- m) Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Fasilitasi pelayanan kesehatan kerja
- n) Pembinaan, pengawasan, fasilitasi pengobatan tradisional
- o) Peningkatan kesehatan anak balita
- p) Peningkatan kesehatan Lansia
- q) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- r) Penyusunan standar akreditasi dan regulasi institusi kesehatan
- s) Peningkatan pelayanan kesehatan SDM rumah sakit dan laboratorium daerah
- t) Pengadaan sarana dan prasarana Rumah sakit serta laboratorium daerah



- u) Meningkatkan status akreditasi Puskesmas dan rumah sakit daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan dan Kewenangan yang ada, kebijakan peningkatan derajat Kesehatan dimana kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

#### **1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pada dasarnya masalah kesehatan bersifat kompleks, tidak berdiri sendiri dan mempunyai keterkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan sendiri oleh dinas kesehatan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harus dilakukan secara lintas sektoral. Program yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan lintas OPD merupakan kegiatan yang dilakukan bersama OPD lain, kegiatan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan, dan kegiatan yang bersifat lintas batas dalam bidang kesehatan.

Kegiatan tersebut meliputi kegiatan lintas OPD, kerjasama dengan LSM/pihak swasta dan pemerintah antar kabupaten/kota, propinsi dan pusat, antara lain Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Ibu dan Anak, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, PKK, rumah sakit, BPJS Kesehatan,) dan asuransi kesehatan lainnya dan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Issu dan aspek strategis permasalahan kesehatan antara lain :

- 1) Masalah pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan



- 2) Masalah jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan kesehatan daerah
- 3) Masalah kesehatan pengembangan serta upaya kesehatan lainnya termasuk kesehatan lintas batas
- 4) Masalah gizi masyarakat meliputi: stunting dan penanganan gizi buruk, ketahanan pangan, pemanfaatan bahan pangan setempat, peningkatan gizi keluarga dan menu seimbang, peningkatan dan penguatan posyandu, lomba balita dan intervensi keluarga miskin dan balita di bawah garis merah (gizi buruk dan gizi kurang), penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA), kekurangan energi kronis (KEK), kesehatan gizi remaja dan wanita pekerja serta ibu hamil dan melahirkan
- 5) Masalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi: penyebarluasan informasi kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan media penyuluhan dengan berbagai media dan pembinaan/pemberdayaan masyarakat melalui bina suasana, percontohan kawasan sehat, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian penghargaan kepada kader kesehatan teladan, keluarga teladan, tokoh masyarakat, stake holder maupun media yang mendukung dan berperan dalam pengembangan dan pembangunan kesehatan
- 6) Masalah penyehatan lingkungan dan sanitasi meliputi: penanganan limbah industri, pencegahan, penanganan dan penanggulangan pencemaran, penyediaan air bersih pedesaan dan perkotaan, penanganan limbah medis, penanganan sampah, penyehatan lingkungan dan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan
- 7) Masalah penanggulangan penyakit meliputi: penanganan



- penyakit bersumber binatang, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit dan Bencana Alam, penanganan pasien dan isolasi penyakit di sarana pelayanan, pencegahan dan pengamatan penyakit di masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu/miskin, anak jalanan, terlantar dan gelandangan
- 8) Masalah kemitraan pelayanan kesehatan meliputi : kerjasama kesehatan dengan lintas sektor dan profesi, penguatan kemitraan dengan stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemitraan dengan perusahaan swasta melalui CSR, kesehatan anak balita di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainya termasuk masyarakat dan kesehatan lansia di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainya termasuk masyarakat
  - 9) Masalah manajemen dan kebijakan kesehatan meliputi: penyelarasan pembangunan kesehatan dan daerah dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan, kursus, ijin belajar dan tugas belajar.
  - 10) Pemenuhan sarana prasarana serta sumber daya kesehatan, termasuk distribusi dan pemetaan pegawai, pemenuhan sementara dengan tenaga nonPNS, pengajuan dan optimalisasi DAK dan sumber anggaran lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

## **1.5 STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor



(2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 3 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 5 ayat (2) menyatakan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan diuraikan pada pasal 5 ayat (3) yaitu;



Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
  1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
  2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
  3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
  1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
  2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas :
  1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
  2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
  3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
  4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan



5. pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
- d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1). Sub Substansi Program dan Informasi;
  - 2). Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset; dan
  - 3). Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1). Sub Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2). Sub Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
  - 3). Sub Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
  - 1). Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - 2). Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan; dan
  - 3). Sub Substansi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  - 1). Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2). Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan



- 3). Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
    - 1). Sub Substansi Kefarmasian;
    - 2). Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
    - 3). Sub Substansi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terbagi dalam dua jenis meliputi ;
    1. UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini adalah Puskesmas sebanyak 20 puskesmas
    2. UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;
      - a) Laboratorium Kesehatan;
      - b) Perbekalan Kesehatan.
  - h. Jabatan Fungsional.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH DAN TUJUAN DINAS KESEHATAN**

Berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Visi

**"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;

**Visi** : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**  
**Misi I** : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**



- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 13 menyatakan Rensta Perangkat Daerah memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan RPJMD Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, maka tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta.



Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui upaya :

- 1). Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan.
- 2). Meningkatkan sumber daya kesehatan yang akuntabel, berkualitas, dan merata.
- 3). Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penguatan jejaring surveilans epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun penyakit yang berpotensi KLB, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
- 4). Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan untuk mendorong terwujudnya lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.
- 5). Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, peserta jaminan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sehat dan produktif.

## **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

### **Strategi**

Sesuai dengan janji Kepala Daerah terpilih termaktub dalam **“9 langkah melanjutkan Purwakarta Istimewa”** dimana kesehatan berada pada langkah kedua yaitu:

2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan Berbasis Online serta Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan



Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dari langkah tersebut maka upaya yang harus dilakukan dengan rincian langkah sebagai berikut:

1. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi
2. Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan
3. (Aplikasi) Berbasis Online dan
4. Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 maka strategi utama yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2018-2023 yaitu **“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi”**

Untuk mencapai strategi tersebut Dinas Kesehatan merumuskan dalam tahapan strategi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan puskesmas rawat inap secara bertahap  
Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana bangunan,

sarana dan alat kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).

- 2) Penguatan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari *paradigma sakit menjadi paradigma sehat*. Sehingga pelayanan kesehatan dapat bergeser dari *pelayanan kuratif menjadi pelayanan promotif dan preventif* dengan tetap tidak meninggalkan pelayanan kuratif. Penguatan puskesmas juga didorong untuk menuju kemandirian puskesmas melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan puskesmas yang akuntabel, adaptif dan inovatif sehingga



memberikan mandat Puskesmas dapat untuk mengembangkan diri secara sehat, fleksibel dan mandiri dengan menggali seluruh potensi dan sumber daya di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

3) Pengembangan upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan

Pelayanan primer dan rujukan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan dan tuntutan perkembangan masyarakat maka perlu upaya pengembangan pelayanan dasar dan rujukan yang *up to date* sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya yang tersedia. Pengembangan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengembangan puskesmas

4) Perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan upaya memberikan perlindungan masyarakat dari kemungkinan terserang atau resiko yang lebih besar dari penyakit melalui upaya pencegahan, pengendalian, pengurangan/ eliminasi dan pemberantasan/eradikasi. Upaya yang dilakukan melalui preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative melalui imunisasi, penyelidikan dan surveilan epidemiologi, penanganan KLB dan pengendalian terhadap sumber penularan dan pengobatan kepada masyarakat yang terinfeksi. Upaya tersebut diharapkan dapat memutuskan mata penularan penyakit sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan bebas dari penyakit yang menular maupun tidak menular. Namun demikian, peran serta masyarakat dan masih adanya

sumber, agent dan media penularan dapat memungkinkan terjadinya penularan kembali di masyarakat. Di sisi lain, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat serta perubahan lingkungan mendorong timbulnya penyakit baru termasuk penyakit tidak menular dan degeneratif. Untuk itu, upaya perlindungan kesehatan harus diikuti kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dari penyakit melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat dan mengikuti petunjuk tenaga kesehatan serta berolahraga secara teratur. Dengan upaya tersebut akan mengurangi dan terhindar dari terkena resiko penyakit.

5) Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kualitas daya dukung lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan kesehatan sesungguhnya merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan apabila terjadi masalah lingkungan maka akan berdampak pada masalah kesehatan seperti kerusakan ekosistem dan habitat vektor penyakit, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, banjir, longsor dan kerusakan hutan akan menyebabkan penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Untuk itu upaya menciptakan kawasan lingkungan sehat, keseimbangan beban lingkungan dengan penduduk, penataan kawasan lingkungan sesuai tata ruang dan pencegahan dampak lingkungan akan mendukung peningkatan kualitas daya dukung lingkungan.

**6) Peningkatan kapasitas tenaga dan sarana pelayanan kesehatan**

Upaya pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau harus didukung dengan kemampuan tenaga dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di lingkup dinas kesehatan dan jaringannya. Kemampuan tenaga bukan hanya tenaga kesehatan tetapi juga tenaga non kesehatan yang bekerja di dinas kesehatan dan jaringannya untuk meningkatkan dedikasi, keahlian dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Kualitas tenaga harus didukung kemampuan dan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan layak baik bangunan, alat, obat dan sarana penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

**7) Pemberdayaan masyarakat dan dukungan stake holder dan lintas sektor, melalui peningkatan peran serta masyarakat menuju kemandirian dalam bidang kesehatan, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan desa siaga sehat.**

Peningkatan derajat kesehatan merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, dukungan stake holder dan lintas sektor.

Masyarakat bukan hanya objek tetapi sekaligus subjek pembangunan kesehatan akan menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu peran serta masyarakat menjadi suatu keharusan dalam untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.



Peran dan dukungan lintas stake holder dan lintas sektor sangat penting, karena masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi tanggung jawab semua pihak, dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, seringkali masalah kesehatan bukan masalah hulu tetapi muara atau hilirnya dari permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti sosial, ekonomi, kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut perlu diselesaikan masalah di hulunya, sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan di hilirnya. Perubahan perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan pekerjaan yang “tidak sekali jadi” tetapi membutuhkan ketekunan, konsistensi, inovasi dan teladan yang nyata di lapangan. Hal ini disebabkan perubahan perilaku membutuhkan waktu yang relatif panjang bisa lima, sepuluh tahun atau lebih dan tidak boleh pantang menyerah. Tetapi perubahan perilaku dapat berubah secara cepat apabila perilaku tersebut telah menjadi trend atau gaya hidup. Hal ini akan terasa terutama pada kelompok generasi muda dan perkotaan atau modern. Sedangkan pada kelompok masyarakat pedesaan tradisional dapat terjadi perubahan apabila telah merasakan manfaat atau melihat kelompok atau tokohnya telah menggunakan/ melakukannya. Untuk itu dalam mendorong masyarakat ber-PHBS maka pemberdayaan masyarakat tersebut harus dapat mendorong PHBS sebagai trend dan pendekatan asas manfaat dan tokoh atau faktor kunci (key person atau

stakeholder) di masyarakat harus terus dilakukan dengan berbagai upaya inovasi, konsistensi dan keberlanjutan program harus digalakan.

Desa siaga sehat merupakan sinergitas dari berbagai program kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat. Program yang berkaitan dengan konsep pelayanan hingga tingkat desa antara lain desa sehat yang dikembangkan oleh penyehatan lingkungan, desa Perilaku Hidup bersih dan sehat yang dikembangkan oleh promosi kesehatan dan desa siaga yang merupakan gabungan dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, surveilans epidemiologi dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat sasaran dan objek kegiatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat desa serta kepentingan yang relatif sama maka perlu mensinergikan program tersebut dalam suatu wadah yang sama. Maka dengan penyatuan kegiatan dalam pengembangan desa siaga sehat dapat lebih mensinergikan kegiatan tersebut dapat efektif dan efisien. Untuk itu peran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan.

8) Pengembangan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan



kesehatan serta tidak dapat diprediksi seseorang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya yang besar. Sementara pada saat tersebut biaya pelayanan kesehatan menjadi *konsumtif* dan tidak menjamin bahwa dia akan betul-betul sembuh dan tidak akan sakit lagi sehingga pernyataan kesehatan sebagai investasi menjadi suatu *anomali*.

Pada masyarakat miskin, pemerintah telah menjamin dengan adanya jaminan kesehatan sehingga beban pelayanan kesehatan akan berpindah masyarakat yang sedikit diatas miskin. Dan masyarakat ini rentan menjadi miskin apabila tidak terlindungi asuransi atau jaminan kesehatan. Pada sisi lain dengan adanya jaminan kesehatan dapat mendorong produktifitas masyarakat karena tidak perlu biaya pengobatan apabila sakit karena telah dijamin oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat mendorong pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, terciptanya standar pelayanan kesehatan yang tidak membedakan status sosial, dan tidak adanya kasus penolakan oleh rumah sakit atau ketidakmampuan masyarakat membayar pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi bertahap

sesuai kemampuan pembiayaan dari anggaran daerah maupun pusat serta kesiapan masyarakat seperti perilaku masyarakat dalam berobat dan pembayaran premi atau iur biaya bila akan dikenakan pembebanan kepada masyarakat serta struktur organisasi maupun mekanisme pengelolaan jaminan kesehatan tersebut.

- 9) Penyusunan perencanaan, kajian dan regulasi pembangunan kesehatan berdasarkan masalah dan potensi daerah, isu strategis dan kebijakan pembangunan baik global, nasional, regional maupun lokal kabupaten.

Perkembangan kesehatan yang semakin kompleks, dinamis dan maju menyebabkan organisasi Dinas Kesehatan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan tersebut. Untuk itu perlunya adanya perencanaan yang terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Selain itu, perlu selalu mengadaptasi terhadap setiap perubahan melalui kajian yang komprehensif dan rasional sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan kesehatan maupun isu strategis baik dalam skala global (dunia), nasional, regional (propinsi atau kewilayahan) maupun kabupaten. Dalam penerapan pelayanan kesehatan yang semakin pesat berkembang perlu didukung regulasi kesehatan yang akuntabel untuk menjadi payung hukum dan perlindungan dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

### **2.3. PRIORITAS DAERAH**

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu



dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami perubahan terkait nomenklatur program dan kegiatan serta adanya menu sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2021**



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
X						
X	XX					
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah Perangkat	
X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sub Substansi PI
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sub Substansi PI
X	XX	01	2,01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sub Substansi PI
X	XX	01	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Substansi PI
X	XX	01	2,01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Substansi PI
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan	
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Bagian KAA



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
X	XX	01	2,02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,03		Administrasi Umum	
X	XX	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
X	XX	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	25	Pengadaan Mebeleur	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
X	XX	01	2,03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
X	XX	01	2,04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	08	Pemindahan Tugas PNS	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian KUH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Sub Substansi SDMK
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Sub Substansi SPAK



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi SPAK
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sub Substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub Substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sub Substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Sub Substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sub Substansi P2 PM

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sub Substansi P2 PM
1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sub Substansi Kesga dan Gizi
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sub Substansi KLKKOR
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sub Substansi KLKKOR
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub Substansi PK & PM
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Sub Substansi PKPKT
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Sub Substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sub Substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sub Substansi SI/ Sub Substansi PKPKT
1	02	02	2,02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sub Substansi P2PM/ PTM

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sub Substansi JPK
1	02	02	2,02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sub Substansi Faralkes
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sub Substansi PKPM
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Substansi PKR &JPK
1	02	02	2,02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Sub Bagian PI
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sub Substansi PKR
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Sub Substansi PKPKT/ UPT Puskesmas
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT Labkes/ Perbekes
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sub Substansi MPK
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sub Substansi SI
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sub Substansi SI
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sub Substansi PI
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sub Substansi PI
1	02	02	2,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Sub Substansi PI
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	02	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Sub Substansi PKR
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Substansi PKR
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Sub Substansi MPK
1	02	02	2,04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sub Substansi PKR &JPK
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota	
1	02	03	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sub Substansi SDMK
1	02	03	2,02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDMK
1	02	03	2,02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Sub Substansi SDMK
1	02	03	2,02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDMK
1	02	03	2,03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	03	2,03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDM
1	02	03	2,03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Sub Substansi SDM
1	02	03	2,04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	03	2,04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDM
1	02	03	2,04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Sub Substansi SDM
1	02	03	2,05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2,05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDM
1	02	03	2,05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Substansi SDM
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub Substansi Farm



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub Substansi Farm
1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub Substansi Farm
1	02	04	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
1	02	04	2,02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sub Substansi Farm
1	02	04	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sub Substansi Farm
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	



KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sub Substansi Farm
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sub Substansi Farm/ Sub Substansi KLKKOR
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Sub Substansi Farm/ Sub Substansi KLKKOR
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang	Sub Substansi Farm

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
1	02	04	2,06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Sub Substansi Farm
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sub Substansi PKPM
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Sub Substansi PKPM
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Sub Substansi PKPM

#### 2.4. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rangka mewujudkan target kinerja. Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, Program-program dan kegiatan serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran dalam upaya pencapaian Visi dan Misi organisasi yang selengkapny dapat dilihat pada Tabel Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2022.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Indeks	71,11
B	Sasaran utama			
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Persentase kematian ibu	%	0.11
		2 Persentase kematian bayi	%	0.44

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
C	Sasaran Program:			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	75
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar	%	95
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	94,81
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	63,89



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari LAKIP merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :



1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang baik laporan kegiatan rutin meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan,

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2021 tidak dilakukan pengukuran.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing



kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian sasaran rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari



guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) atau dampak (*impacts*). Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.



Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 – 2023.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2021.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2021.

### **3.2. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Pw.02.02/303/Inspt.Irban III/2022 tanggal 15 Maret 2022, dimana Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan dengan hasil evaluasi sebesar 80,55 (dengan kategori A-Memuaskan). Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 mendapatkan penilaian “BB” (sangat Baik) dengan nilai 75,92 tahun 2019 sebesar 72,71 dan 2018 sebesar 70,32.

### **Ringkasan Kinerja**

Pencapaian sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 - 2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disajikan pada grafik 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan, Sasaran Utama dan Sasaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
A	Tujuan						
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Indeks	70,68	71,18	100,71	
B	Sasaran utama						
	Meningkatnya aksesibilitas dan	1 Persentase kematian ibu	%	0,11	0,148	74,32	



No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
	elayanan kesehatan yang berkualitas	2 Persentase kematian bayi	%	0.44	0,433	101,62	
C	Sasaran Program :						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	B	A	100	Menunggu hasil penilaian inspektorat
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80	80	100	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	75	83,43	111,24	
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	95	98,41	103,59	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	94,81	100	105,48	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	63,89	68,09	106,58	

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis meliputi sasaran tujuan, sasaran



utama dan sasaran program. Pada sasaran tujuan terdapat 1 (satu) indikator, sasaran utama terdapat 2 (dua) indikator dan sasaran program terdapat 7 (tujuh) indikator, sehingga terdapat 10 (sepuluh) indikator yang diukur dalam penilaian kinerja di Dinas Kesehatan.

Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 9 indikator (90%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu 1 indikator sasaran. Penyebab indikator yang belum mencapai disebabkan sangat kompleksnya penanganan kasus kematian ibu, disamping masih adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Selain itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat, anggaran yang belum memadai serta data pelaporan yang belum optimal.

### **Rincian kinerja**

Tahun 2022 adalah tahun ketiga implementasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023, Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun 2021 ;

#### **Tujuan dan Sasaran Utama :**

Adapun tujuan Dinas Kesehatan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu :

#### **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu :

**“Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas”**

Hasil capaian tujuan dan sasaran pada Renstra sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2  
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan dan Sasaran Utama  
Dinas Kesehatan Tahun 2021- 2022**

No	Indikator	2021			2022		
		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian
	Tujuan :						
	Umur harapan hidup	70,63	70,98	100,50	70,68	71,18	100,71
	Sasaran :						
1	Persentase kematian ibu	0,12	0,270	45	0,11	0,148	74,32
2	Persentase kematian bayi	0,46	0,410	111	0,440	0,433	101,62

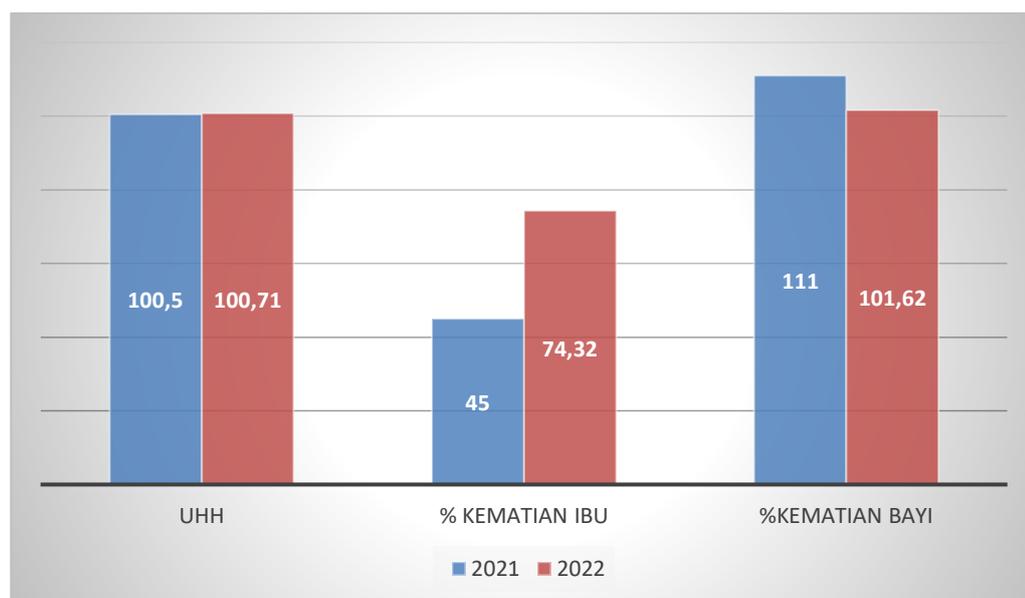
Berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran utama, dari dua indikator tersebut, kematian ibu belum mencapai target sedangkan kematian bayi melampaui target dengan capaian diatas 100%.

Hal ini terlihat meskipun kematian ibu masih belum mencapai target, tetapi telah mengalami penurunan dari 0,27% menjadi 0,148%. Dan apabila dikonversi angka nasional perseratus ribu kelahiran hidup menjadi turun dari 270

perseratus ribu kelahiran hidup menjadi 148 perseratus ribu kelahiran hidup yang dilaporkan. Sedangkan kematian bayi sudah menunjukkan tren yang kenaikan meskipun tetap dibawah target Renstra Dinas Kesehatan, sehingga capaiannya masih diatas 100%.

Adapun perkembangan 3 indikator utama Dinas Kesehatan tahun 2021-2022 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021- 2022**

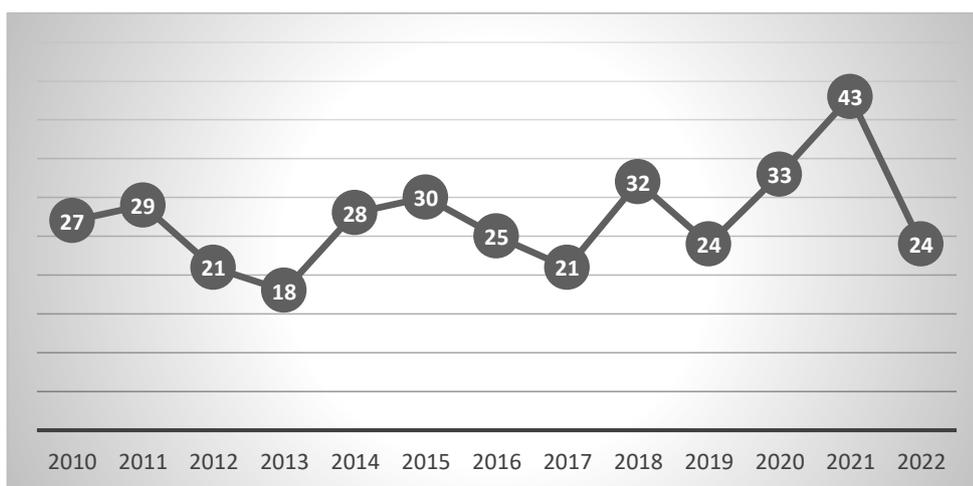


Dari grafik tersebut menunjukkan adanya upaya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian kinerja utama untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan kasus kematian ibu tercatat tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 dan

sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 24 kasus. Hal ini terlihat pada grafik 3.2 di bawah ini.

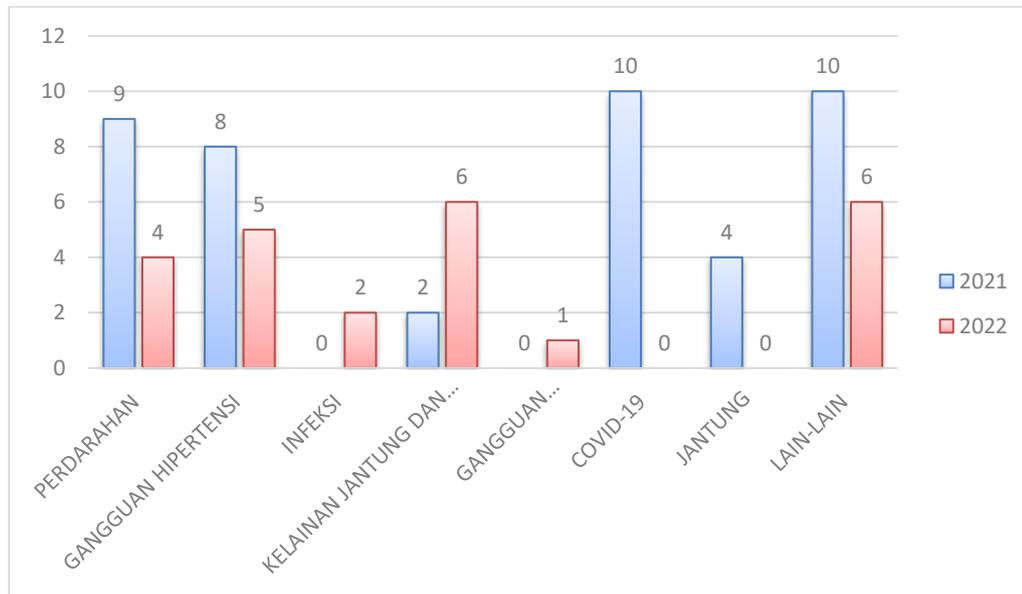
**Grafik 3.2**  
**Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Maternal**  
**di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 s/d 2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2010-2022

Penyumbang kematian ibu tertinggi tahun 2022 disebabkan kelainan jantung dan pembuluh darah 6 kasus, lain-lain 6 kasus, gangguan hipertensi 5 kasus dan perdarahan 4 kasus. Yang lainnya infeksi 2 kasus dan gangguan cerebrovaskular 1 kasus. Sedangkan 6 kasus lain-lain disebabkan adanya penyakit penyerta seperti tbc, dan hepatitis. Hal ini berbeda dengan kasus kematian ibu tertinggi tahun 2021 disebabkan Covid-19 sebanyak 10 kasus, sedangkan 10 kasus lainnya disebabkan adanya penyakit penyerta seperti tbc, dan hepatitis. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.3**  
**Penyebab Kematian Ibu Maternal**  
**di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan 2022**



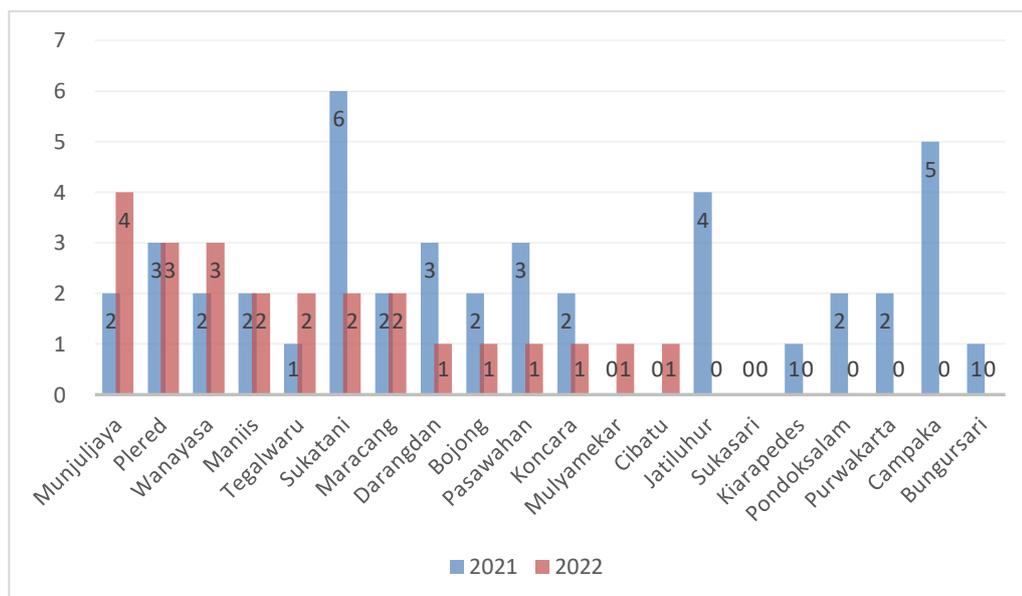
Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2022

Pergeseran kasus kematian ibu kemungkinan telah melemahnya pandemi Covid-19 karena meningkatnya imunitas masyarakat yang disebabkan tingginya capaian vaksinasi covid-19 serta gaya hidup masyarakat yang ditandai bergesernya dan meningkatnya penyakit tidak menular dan degeneratif di masyarakat termasuk pada kelompok berisiko seperti ibu hamil, melahirkan dan menyusui.

Berdasarkan pemetaan kasus kematian ibu menunjukkan Puskesmas Munjuljaya paling tinggi dan meningkat pada tahun 2022, dimana tercatat sebanyak 2 kasus tahun 2021 meningkat menjadi 4 kasus tahun 2022. Puskesmas yang lain yang mengalami peningkatan lainnya adalah Puskesmas Wanayasa, Tegalwaru, Mulyamekar dan Cibatu. Sedangkan puskesmas yang lainnya mengalami penurunan dan tetap. Adapun Puskesmas yang tetap sama dengan 2021 yaitu Puskesmas Plered sebanyak 3 kasus, Puskesmas Maniis dan Maracang masing-masing 2 kasus. Penurunan kasus tertinggi kematian ibu tahun 2021-2022

yaitu Puskesmas Campaka dari 5 kasus menjadi 0 kasus, Puskesmas Sukatani dari 6 kasus menjadi 2 kasus dan Puskesmas Jatiluhur dari 4 kasus menjadi 0 kasus. Selain itu terdapat puskesmas yang tercatat zero kematian tahun 2021-2022 yaitu Puskesmas Sukasari, Sedangkan yang zero kematian ibu tahun 2022 yaitu Puskesmas Jatiluhur, Sukasari, Kiarapedes, Pondoksalam, Purwakarta, Campaka dan Bungursari. Hal ini terlihat pada grafik 3.3 di bawah ini.

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Kematian Ibu Antar Puskesmas di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2022**



Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2022

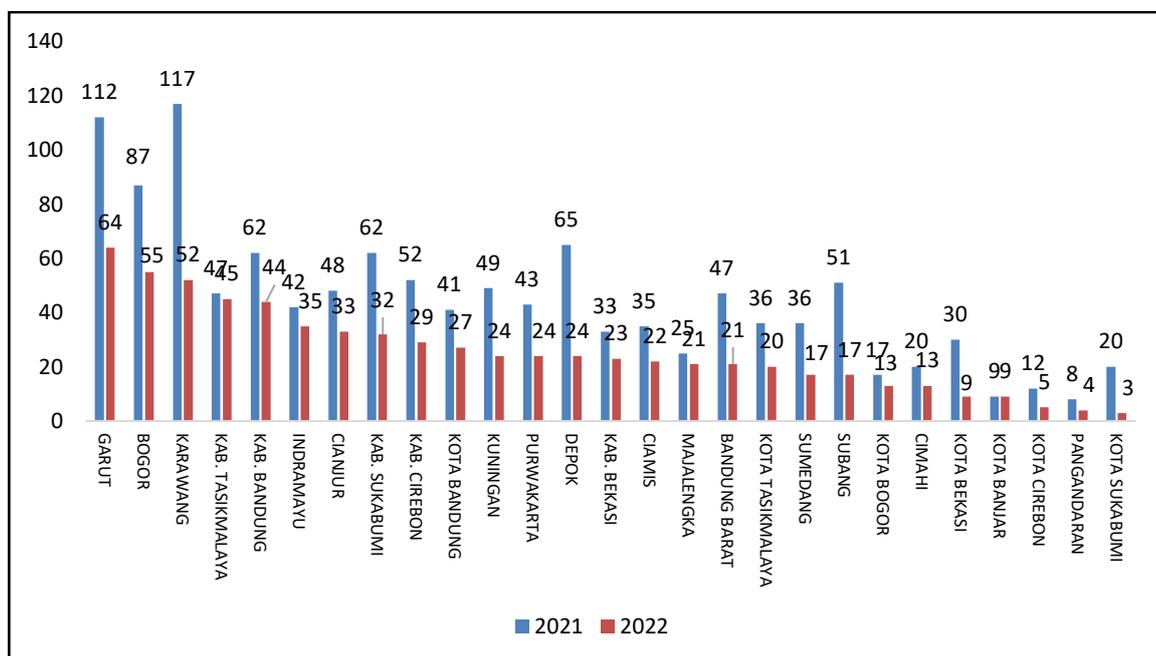
Berdasarkan data kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kabupaten Purwakarta berada di kelompok tengah yaitu pada dua belas besar kabupaten yang memiliki kematian ibu cukup tinggi, sedangkan apabila dilihat dari kelompok kematian terendah Kabupaten Purwakarta berada pada urutan 16 tahun 2022. Sedangkan apabila



dibandingkan dengan wilayah terdekat seperti Kabupaten Subang, Karawang, Bandung Barat dan Cianjur, maka Kabupaten Purwakarta hanya lebih rendah dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur, dimana Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 52 kasus dan Kabupaten Cianjur 33 kasus. Tetapi apabila melihat penurunan kasus maka Kabupaten Karawang penurunan kasus sebanyak 65 kasus (55,56%), Kabupaten Cianjur 15 kasus (31,25%) dan Kabupaten Purwakarta sebanyak 19 kasus (44,18%).

Data jumlah kematian ibu di Jawa Barat tahun 2022 sebanyak 685 kasus menurun dari 1188 kasus tahun 2021, dengan kasus kematian ibu tertinggi tahun 2022 yaitu Kabupaten Garut sebanyak 64 kasus dan tahun 2021 yaitu Kabupaten Karawang sebanyak 117 kasus. Sedangkan kasus terendah Kota Sukabumi sebanyak 3 kasus dan tahun 2021 Kabupaten Pangandaran sebanyak 8 kasus. Hal ini terlihat pada grafik 3.5 di bawah ini.

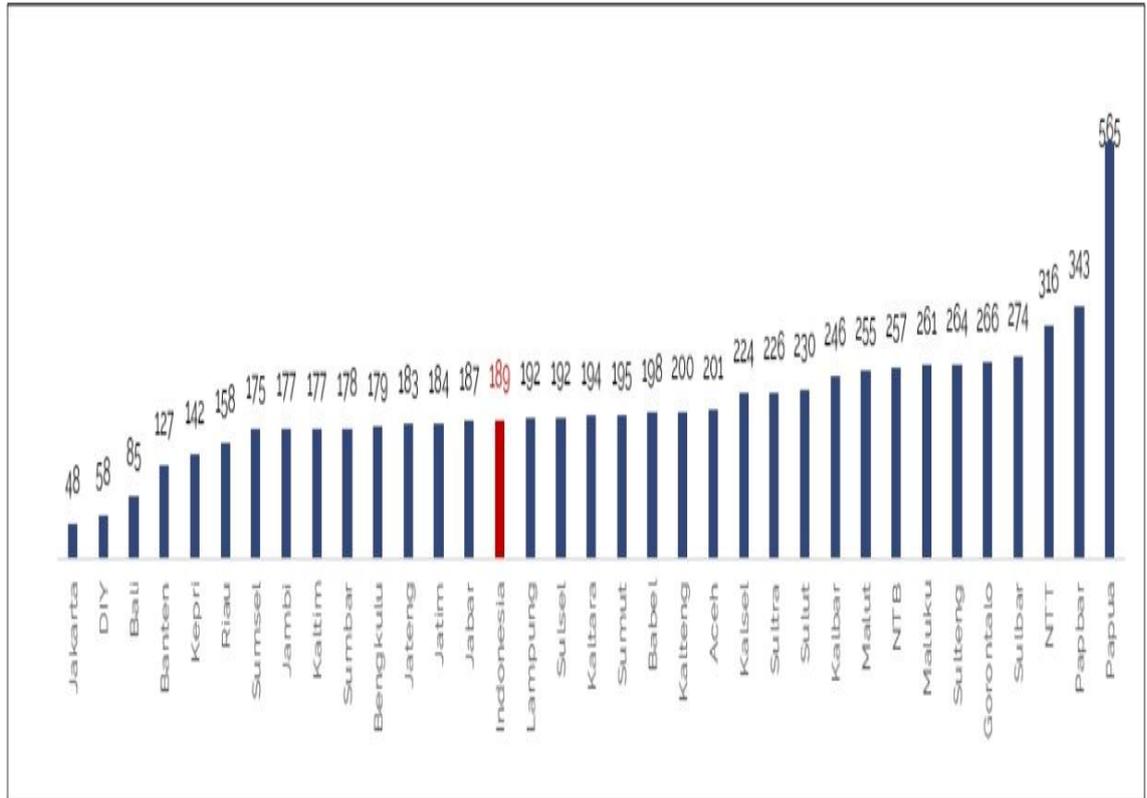
**Grafik 3.5**  
**Perbandingan Kematian Ibu di Kabupaten Purwakarta**  
**dengan Kabupaten/Kota Lainnya**  
**dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, menunjukkan hasil Long Form SP2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Barat sebesar 187 yang artinya terdapat 187 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas dari 100.000 kelahiran hidup, AKI Jawa Barat di bawah dari AKI Nasional (189/100.000 KH). Hal ini terlihat pada grafik 3.6 di bawah ini.

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan AKI Provinsi Jawa Barat dan antar Provinsi di Indonesia Tahun 2020**



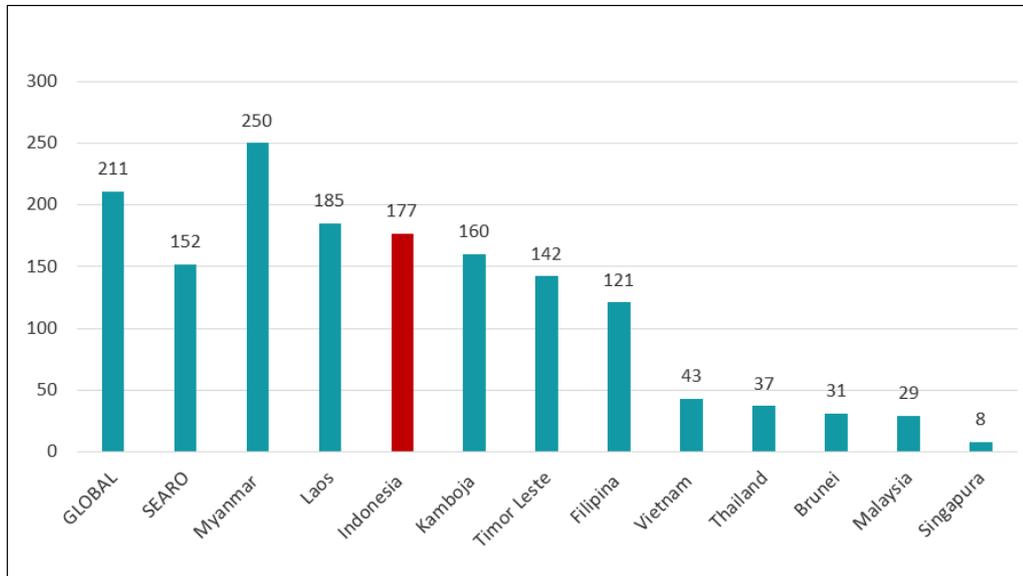
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Dengan melihat data diatas, bahwa AKI Provinsi Jawa Barat sebesar 187 dan AKI Nasional 189, kasus kematian ibu di Kabupaten Purwakarta dan apabila dikonversi angka nasional perseratus ribu kelahiran hidup tercatat sebesar 148 perseratus ribu kelahiran hidup yang dilaporkan. Sehingga kasus kematian ibu di Kabupaten Purwakarta masih dibawah AKI Nasional dan AKI Jawa Barat.

Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan 177/100.000 KH jumlah kematian Ibu pertahun. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 3.7 dibawah ini.

**Grafik 3.7**

### Angka Kematian Ibu Antara Indonesia dan Negara-Negara Lainnya di Asia Tenggara Tahun 2019



Sumber: Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. WHO, 2019. Diprediksi dg AKI 177/100.000 KH jumlah kematian Ibu pertahun:

Berdasarkan jumlah kematian ibu di Jawa Barat tahun 2022, selain dianalisis berdasarkan jumlah kasus, maka perlu dilakukan analisis terhadap trend, persentase dan AKI yang dilaporkan. Hal ini dilakukan bahwa jumlah kasus yang tinggi tentu harus dilihat juga jumlah kelahiran hidup sebagai pembagi(penyebut)nya serta kecenderungan (trend) dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta secara jumlah kasus tahun 2022 berada pada peringkat 16, tetapi berdasarkan persentase dan AKI yang dilaporkan berada pada peringkat 23 atau 5 terbawah sedangkan apabila apabila trend kenaikan dan penurunan berada pada peringkat 18 dan persentase trend kenaikan berada pada peringkat 16. Hal ini terlihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3**

**Analisis Perbandingan Kasus Kematian Ibu, Trend, Persentase dan AKI yang dilaporkan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten/Kota Lainnya Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022**

No	Kabupaten/ Kota	2022	2021	Trend +/-	% Trend Kenaikan	Kelahiran Hidup Thn 2022	% Kematian Ibu Thn 2022	AKI yang dilaporkan Thn 2022
1	Kota Sukabumi	3	20	17	85	5.272	0,057	57
2	Pangandaran	4	8	4	50	5.309	0,075	75
3	Kota Cirebon	5	12	7	58,33	4.804	0,104	104
4	Kota Banjar	9	9	0	0	2.696	0,334	334
5	Kota Bekasi	9	30	21	70	49.284	0,018	18
6	Kota Bogor	13	18	5	27,78	17.554	0,074	74
7	Kota Cimahi	13	20	7	35	9.609	0,135	135
8	Sumedang	17	36	19	52,78	16.252	0,105	105
9	Subang	17	51	34	66,67	21.917	0,078	78
10	Kota Tasikmalaya	20	35	15	42,86	11.173	0,179	179
11	Majalengka	21	25	4	16	17.353	0,121	121
12	Bandung Barat	21	47	26	55,32	28.472	0,074	74
13	Ciamis	22	36	14	38,89	15.799	0,139	139
14	Bekasi	23	33	10	30,30	75.146	0,031	31
15	Kuningan	24	42	18	42,86	16.076	0,149	149
16	Purwakarta	24	43	19	44,19	16.172	0,148	148
17	Kota Depok	24	56	32	57,14	42.747	0,056	56
18	Kota Bandung	27	41	14	34,15	37.338	0,072	72
19	Cirebon	29	52	23	44,23	33.550	0,086	86
20	Sukabumi	32	62	30	48,39	41.508	0,077	77
21	Cianjur	33	48	15	31,25	38.921	0,085	85
22	Indramayu	35	41	6	14,63	24.840	0,141	141
23	Bandung	44	62	18	29,03	66.836	0,066	66
24	Tasikmalaya	45	45	0	0	26.877	0,167	167
25	Karawang	52	117	65	55,56	37.658	0,138	138
26	Bogor	55	87	32	36,78	111.012	0,050	50
27	Garut	64	112	48	42,86	47.207	0,136	136
	Jumlah Kasus	685	1188	503	42,34	821.382	0,083	83
	Rata-Rata Kasus	25	44					

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (data diolah), Tahun 2021-2022

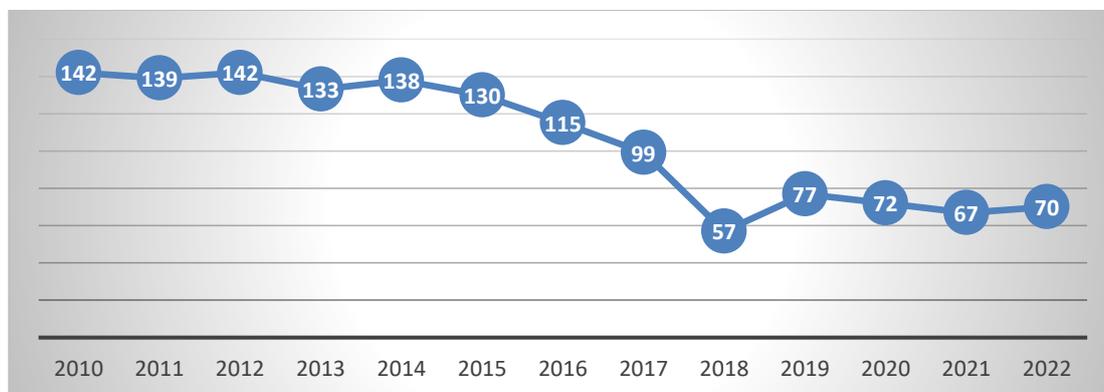


Dengan melihat hal diatas, bahwa kematian ibu masih menjadi masalah prioritas yang harus ditangani, karena meskipun mengalami penurunan yang signifikan, tetapi masih diatas rata-rata kasus Jawa Barat, dan cenderung ada di kelompok tengah dan bawah pada kasus kematian ibu di Jawa Barat.

Permasalahan kematian ibu merupakan masalah yang kompleks baik dari sisi internal maupun eksternal. Permasalahan internal seperti pelayanan kesehatan, sarana dan sumber daya manusia kesehatan yang belum merata baik dari jumlah, jenis dan mutunya, pembiayaan yang belum optimal, pendataan dan penyisiran data sasaran yang belum maksimal. Sedangkan dari masalah eksternal antara lain perilaku ibu bersalin, dukungan keluarga dan masyarakat termasuk perencanaan kehamilan dan persalinan serta dukungan lintas sektor. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Selanjutnya terkait kasus kematian bayi menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan empat tahun yang sebelumnya. Dimana tahun 2022 tercatat sebanyak 70 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2019-2021. Kematian bayi didukung masih tingginya bayi neonatal sebanyak 60 kasus dan postneonatal 10 kasus.rend yang positif yaitu penurunan kasus kematian bayi, dimana tahun 2021 tercatat sebanyak 67 kasus menurun dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian dan analisis lebih lanjut masih tingginya kematian bayi tersebut. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

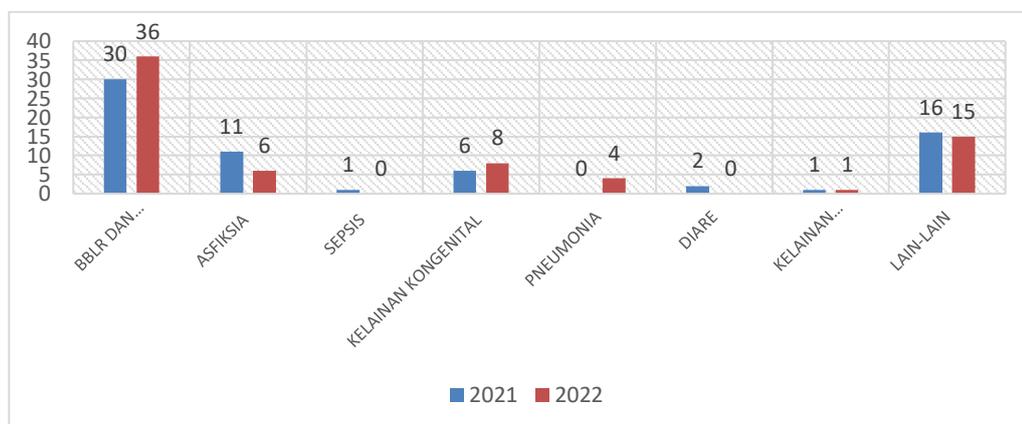
**Grafik 3.8**  
**Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2010 s/d 2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2010-2022

Berdasarkan penyebab kematian bayi tahun 2021-2022 menunjukkan kematian tertinggi disebabkan pemicunya adalah BBLR dan Prematuritas BBLR dimana tercatat sebanyak 30 kasus tahun 2021 meningkat menjadi 36 kasus tahun 2022. Hal ini terlihat pada grafik 3.9 di bawah ini.

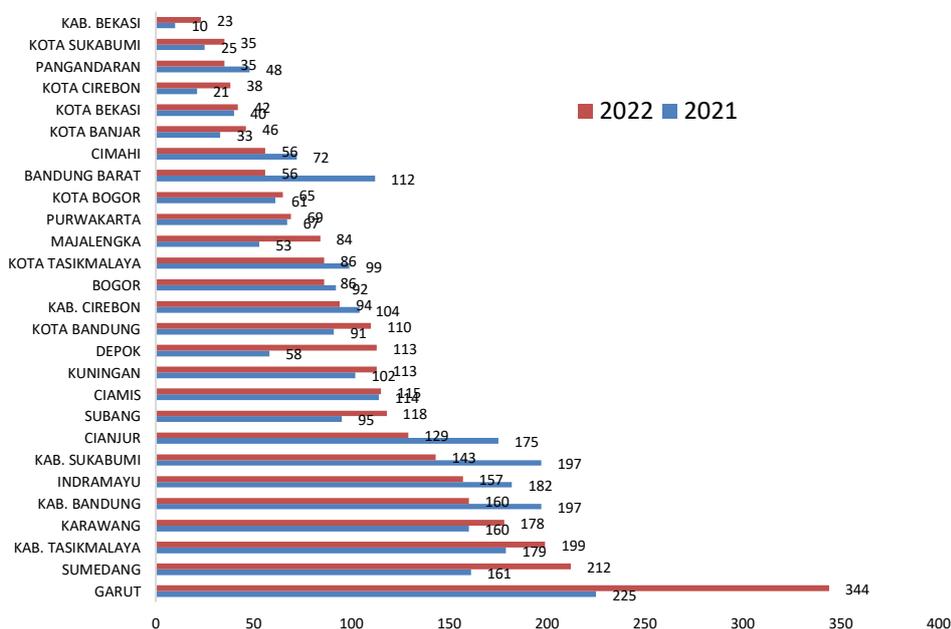
**Grafik 3.9**  
**Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2021-2022**



Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, Tahun 2021-2022

Berdasarkan data kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kabupaten Purwakarta berada di kelompok tengah yaitu dilihat dari kelompok kematian terendah berada pada urutan 10 tahun 2022 dan urutan 11 tahun 2021 dan. Data jumlah kematian bayi di Jawa Barat tahun 2022 sebanyak 2.907 kasus, dengan kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Garut sebanyak 344 kasus meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 217 kasus, dan terendah Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kasus meningkat dari 10 kasus tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada grafik 3.10 di bawah ini.

**Grafik 3.10**  
**Jumlah Kematian Bayi Per Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022**

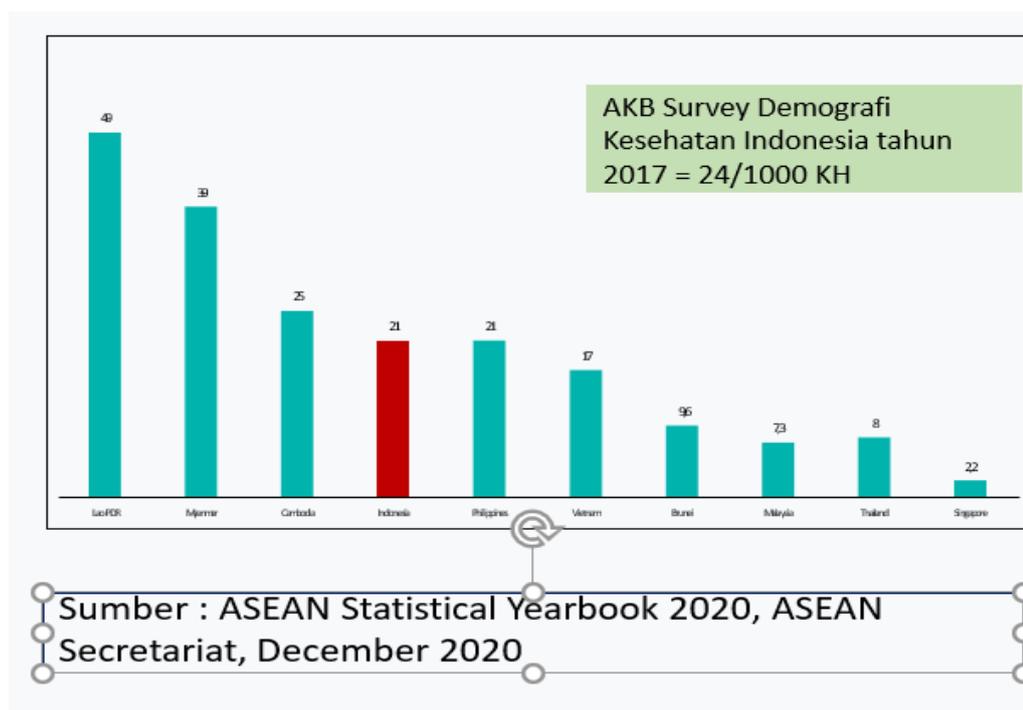


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Apabila melihat Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan 21/1.000 kelahiran hidup dan berada pada urutan

keempat diantara negara-negara Asia Tenggara. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 3.11 dibawah ini.

**Grafik 3.11**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Antara Indonesia dan Negara-Negara Lainnya di Asia Tenggara Tahun 2020**



Sedangkan AKB di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tercatat menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,56 per 1.000 kelahiran hidup selama satu dekade terakhir. Di Bawah AKB Nasional (16,85 per 1.000 KH).

Dengan melihat data di atas maka Kabupaten Purwakarta apabila dibandingkan dengan data Provinsi Jawa Barat berada 4,33 perseribu berdasarkan kematian bayi yang dilaporkan, sehingga berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan angka nasional. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 3.12 dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Analisis Perbandingan Kasus, Trend dan Persentase Trend Kenaikan, Persentase Kematian Bayi dan AKB yang dilaporkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022**

No	Kab/Kota	2022	2021	Trend +/-	% Trend Kenaikan	Kelahiran Hidup Tahun 2022	% Kematian Bayi Tahun 2022	AKB yang dilaporkan Tahun 2022
1	Bekasi	23	10	-13	-130	75.146	0,031	0,31
2	Pangandaran	35	48	13	27,08	5.309	0,659	6,59
3	Kota Sukabumi	35	25	-10	-40	5.272	0,664	6,64
4	Kota Cirebon	38	21	-17	-80,95	4.804	0,791	7,91
5	Kota Bekasi	42	39	-3	-7,69	49.284	0,085	0,85
6	Kota Banjar	46	33	-13	-39,39	2.696	1,706	17,06
7	Bandung Barat	56	112	56	50	28.472	0,197	1,97
8	Kota Cimahi	56	72	16	22,22	9.609	0,583	5,83
9	Kota Bogor	65	62	-3	-4,84	17.554	0,370	3,70
10	Purwakarta	70	67	-3	-4,48	16.172	0,433	4,33
11	Majalengka	84	52	-32	-61,54	17.353	0,484	4,84
12	Bogor	86	92	6	6,52	111.012	0,077	0,77
13	Kota Tasikmalaya	86	96	10	10,42	11.173	0,770	7,70
14	Cirebon	94	104	10	9,62	33.550	0,280	2,80
15	Kota Bandung	110	91	-19	-20,88	37.338	0,295	2,95
16	Kota Depok	113	55	-58	-105,45	42.747	0,264	2,64
17	Kuningan	113	60	-53	-88,33	16.076	0,703	7,03
18	Ciamis	115	114	-1	-0,88	15.799	0,728	7,28
19	Subang	118	95	-23	-24,21	21.917	0,538	5,38
20	Cianjur	129	175	46	26,29	38.921	0,331	3,31
21	Sukabumi	143	188	45	23,94	41.508	0,345	3,45
22	Indramayu	157	179	22	12,29	24.840	0,632	6,32
23	Bandung	160	169	9	5,33	66.836	0,239	2,39
24	Karawang	178	160	-18	-11,25	37.658	0,473	4,73
25	Tasikmalaya	199	178	-21	-11,80	26.877	0,740	7,40
26	Sumedang	212	158	-54	-34,18	16.252	1,304	13,04
27	Garut	344	217	-127	-58,53	47.207	0,729	7,29
	Jawa Barat	2907	2672	-88	-3,29	821.382	0,354	3,54
	Rata2 Kasus	107,67	98,96	-3,26		30.422	0,013	0,13

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan (data diolah), Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa peringkat kasus berada di urutan 10, trend kenaikan adanya peningkatan kasus sebanyak 3 kasus meningkat dari tahun sebelumnya dengan % trend kenaikan -4,48%, % kematian bayi 0,433% dengan AKB dari kasus bayi yang dilaporkan sebesar 4,33 perseribu kelahiran hidup.

Selanjutnya terhadap evaluasi indikator sasaran program terdapat 7 indikator pada 5 Program berdasarkan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 serta Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Hal ini menunjukkan terdapat semua indikator telah mencapai target yang diharapkan, bahkan terdapat 5 indikator yang capaiannya diatas 100%. Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang berada pada sasaran program sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran Program**  
**Dinas Kesehatan Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	B	A	100	Menunggu hasil penilaian inspektorat
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80	80	100	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	75	83,43	111,24	

No	Sasaran strategis	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	95	98,41	103,59	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	94,81	100	105,48	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	63,89	68,09	106,58	

### Deskripsi sasaran :

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran menunjukkan dari 7 (tujuh) indikator telah mencapai target bahkan terdapat 5 indikator yang capaiannya diatas 100%. terdapat 5 indikator (71,4%) yang mencapai 100% keatas. Dan ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, sehingga dapat mencapai target tersebut.

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Sasaran	Realisasi				Jumlah	%
			TW1	TW2	TW3	TW4		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.789	4.247	4.185	4678	3.961	17.071	95,96
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.981	3.785	3.929	4315	3.900	15.929	93,80
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.521	4.068	4.207	4538	3.708	16.521	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	78.146	14.109	14.218	18955	16.200	63.482	81,24
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	161.044	0	0	0	91.453	91.453	56,79
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	628.371	91.622	76.730	144.004	187.028	499.384	79,47
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	104.072	8.371	11.218	13.961	16.651	50.201	48,24
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	231.241	32.168	26.868	53.420	62.865	175.321	75,82
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.952	3.456	4.513	7.369	4.614	19.952	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.845	613	393	455	384	1.845	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	13.273	2.694	2.562	3.823	4.194	13.273	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	20.367	3.182	3.036	4.455	3.560	14.233	69,88
	Cakupan SPM							83,43

Sumber laporan aplikasi komdat.kemkes.go.id

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan hanya 4 jenis pelayanan yang mencapai target 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB serta terdapat 2 jenis pelayanan yang mendekati 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

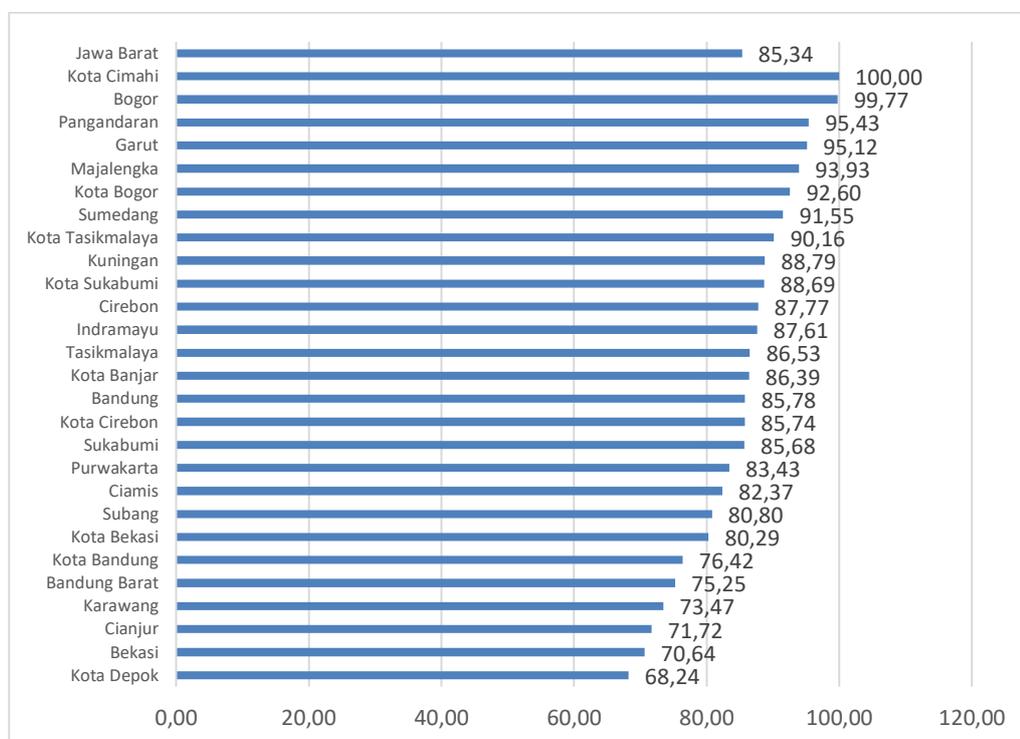


Capaian yang masih rendah dan belum mencapai target, disebabkan jumlah sasaran yang sangat besar dan luas karena mencakup semua jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan cakupan luastersebut, tentu membutuhkan strategi dan sinergitas dengan perangkat daerah lain, anggaran yang terbatas dan adanya pandemi covid-19 sehingga masih refokusing anggaran, serta kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas, disebabkan masih terbatasnya rekrutmen tenaga ASN, sulitnya perpindahan tenaga dan kurangnya tenaga profesional non Kesehatan. Kebijakan lain terkait pemenuhan kebutuhan dan pengembangan SDM seperti tidak boleh menarik SDM dari puskesmas dengan pertimbangan tidak boleh beralih jabatan fungsional dari Puskesmas saat dipindahkan ke Dinas Kesehatan seperti perawat, bidan, dll padahal Dinas Kesehatan membutuhkan tenaga tersebut untuk peningkatan dan pengembangan program termasuk penguasaan program tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan pengembangan dan inovasi program karena tidak didukung tenaga Kesehatan yang akuntabel dan berkualitas.

Permasalahan lainnya, terkait luasnya jumlah sasaran yang mencakup semua penduduk. Seperti usia produktif yang mencakup usia 15-59 tahun, usia Pendidikan dasar 9 tahun, dimana sasaranya bukan hanya anak sekolah formal sampai dengan SMP, tetapi termasuk anak usia Pendidikan non formal dan keagamaan seperti pesantren dan lain-lain. Hal ini selain tidak didukung dana yang memadai dan tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan sendiri, termasuk bantuan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seterusnya.

Berdasarkan cakupan SPM, maka Kabupaten Purwakarta berada pada angka 83,43, masih di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 85,34 dan berada pada urutan kedelapan belas dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan dan perlu upaya kerja keras setidaknya mencapai rata-rata Jawa Barat dan harapannya dapat mencapai 100% semua penduduk terlayani SPM. Adapun Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi Kota Cimahi dan terendah Kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.12**  
**Rata-Rata Capaian SPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, komdat.kemkes.go.id dan spm.bangda,kemdagri (data diolah) 2022

Sedangkan capaian secara rinci antar kabupaten/kota se-Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Sampai Dengan Triwulan IV Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Standar Pelayanan Minimal Sampai Dengan Triwulan Iv Tahun 2022												
		Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Penderita Hipertensi	Diabetes Melitus	ODGJ	Tb	HIV	Rata-Rata Kab/Kota
1	Bogor	99,93	99,36	99,04	99,12	99,82	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>99,77</b>
2	Sukabumi	94,14	94,85	100,00	100,00	62,88	61,34	94,88	86,06	80,06	100,00	100,00	53,98	<b>85,68</b>
3	Cianjur	94,38	91,59	98,34	100,00	69,57	43,05	70,62	34,53	92,98	41,40	70,60	53,56	<b>71,72</b>
4	Bandung	97,67	96,81	99,47	99,43	65,94	74,19	84,29	71,66	98,90	80,30	76,22	84,47	<b>85,78</b>



No.	Kabupaten/ Kota	Standar Pelayanan Minimal Sampai Dengan Triwulan Iv Tahun 2022												
		Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Penderita Hipertensi	Diabetes Melitus	ODGJ	Tb	HIV	Rata-Rata Kab/Kota
5	Garut	95,58	94,00	99,30	92,00	100,00	100,00	91,43	95,36	89,10	84,66	100,00	100,00	<b>95,12</b>
6	Tasikmalaya	98,78	89,52	97,85	87,65	90,16	61,70	85,10	100,00	100,00	69,37	100,00	58,28	<b>86,53</b>
7	Ciamis	88,96	89,36	88,57	84,76	97,32	66,97	91,47	43,87	43,19	100,00	100,00	93,94	<b>82,37</b>
8	Kuningan	90,01	97,75	100,00	97,13	90,24	66,88	78,87	80,25	87,83	91,86	87,48	97,22	88,79
9	Cirebon	95,19	92,92	93,26	98,97	97,33	78,80	81,33	63,87	83,19	89,44	93,54	85,40	87,77
10	Majalengka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72,86	100,00	76,48	100,00	100,00	100,00	77,76	93,93
11	Sumedang	86,49	91,90	93,98	100,00	68,56	97,03	83,43	98,91	98,46	98,20	81,63	99,98	91,55
12	Indramayu	95,28	99,41	100,00	81,28	46,68	100,00	62,39	100,00	100,00	100,00	66,77	99,54	87,61
13	Subang	100,00	100,00	100,00	97,71	100,00	46,32	57,84	31,88	69,79	66,11	100,00	100,00	80,80
14	Purwakarta	95,96	93,80	100,00	81,24	56,79	79,47	48,24	75,82	100,00	100,00	100,00	69,88	83,43

No.	Kabupaten/ Kota	Standar Pelayanan Minimal Sampai Dengan Triwulan Iv Tahun 2022												
		Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Penderita Hipertensi	Diabetes Melitus	ODGJ	Tb	HIV	Rata-Rata Kab/Kota
15	Karawang	89,18	94,45	100,00	89,08	85,12	23,36	71,03	31,61	42,82	73,55	97,89	83,50	73,47
16	Bekasi	100,00	99,91	100,00	85,45	100,00	32,65	89,37	13,31	92,80	63,47	52,71	18,03	70,64
17	Bandung Barat	90,96	86,02	83,81	91,36	82,71	74,54	64,60	16,71	40,98	100,00	84,58	86,66	75,25
18	Pangandaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	63,60	100,00	94,55	100,00	100,00	100,00	86,96	95,43
19	Kota Bogor	95,27	93,85	97,95	93,33	78,25	100,00	52,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,60
20	Kota Sukabumi	100,00	100,00	100,00	95,90	64,63	41,36	89,47	89,54	100,00	87,63	95,82	100,00	88,69
21	Kota Bandung	92,63	91,01	92,78	75,77	67,25	19,99	56,31	23,65	98,70	98,93	100,00	100,00	76,42
22	Kota Cirebon	95,14	94,67	98,46	17,90	87,34	87,49	48,32	99,69	99,90	100,00	100,00	100,00	85,74
23	Kota Bekasi	96,35	96,83	96,18	97,53	74,60	38,09	81,93	38,91	94,99	64,15	100,00	83,90	80,29
24	Kota Depok	90,95	92,14	94,38	82,78	56,92	22,18	75,02	75,02	19,98	86,06	58,43	65,05	68,24



No.	Kabupaten/ Kota	Standar Pelayanan Minimal Sampai Dengan Triwulan Iv Tahun 2022												
		Ibu Hamil	Ibu Bersalin	Bayi Baru Lahir	Balita	Usia Pendidikan Dasar	Usia Produktif	Usia Lanjut	Penderita Hipertensi	Diabetes Melitus	ODGJ	Tb	HIV	Rata-Rata Kab/Kota
25	Kota Cimahi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Kota Tasikmalaya	94,74	98,76	84,75	99,43	90,03	77,03	49,80	88,49	98,89	100,00	100,00	100,00	90,16
27	Kota Banjar	100,00	99,86	100,00	100,00	100,00	68,67	43,00	36,29	88,92	100,00	100,00	100,00	86,39
	<b>Jawa Barat</b>	<b>95,47</b>	<b>95,51</b>	<b>96,97</b>	<b>90,66</b>	<b>82,67</b>	<b>66,58</b>	<b>75,97</b>	<b>69,13</b>	<b>85,98</b>	<b>88,71</b>	<b>91,32</b>	<b>85,11</b>	85,34

Untuk mencapai sasaran Dinas Kesehatan maka dilaksanakan melalui 5 Program terdiri 1 program penunjang dan 4 program teknis Dinas Kesehatan dan 23 kegiatan dengan 78 sub kegiatan anggaran. Adapun capaian program-program tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2022**

No	Program	Tolok Ukur	Capaian Program				Penanggung Jawab
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	B	A	100	Sekretariat
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80	80	100	Sekretariat
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan	%	75	83,43	111,24	Semua Bidang, Sekretariat dan UPTD
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	95	100	105,26	Semua Bidang, Sekretariat dan UPTD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar	%	95	98,41	103,59	Bidang SDK

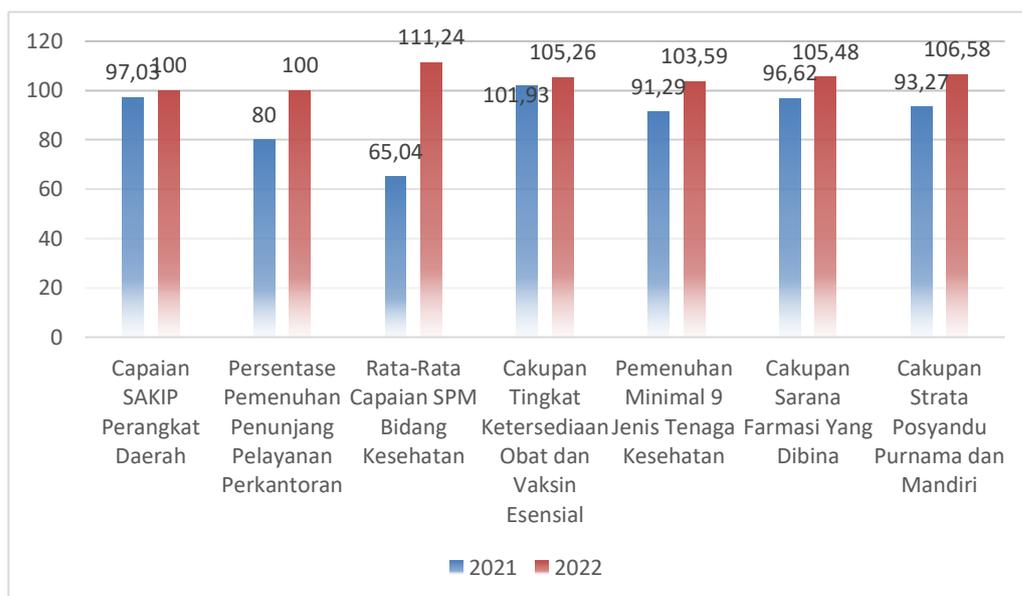


No	Program	Tolok Ukur	Capaian Program				Penanggung Jawab
			Satuan	Target	Realisasi	%	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	94,81	100	105,48	Bidang SDK, Bidang Kesmas
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	63,89	68,09	106,58	Bidang Kesmas

Berdasarkan capaian program maka terdapat program yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sedangkan 2 program dilaksanakan bidang Sumber Daya Manusia kesehatan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman serta satu program lainnya dilaksanakan oleh bidang Kesehatan Masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Selain itu Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dilaksanakan juga oleh bidang Kesehatan masyarakat yaitu pemeriksaan kualitas air dan tempat fasilitas makanan terkait hygiene dan sanitasi makanan, sedangkan pengawasan farmasi, obat dan makanan terkait zat aditif dan bahan tambahan makanan menjadi tanggung bidang Sumber Daya Manusia khususnya substansi kefarmasian. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh sekretariat. Hasil capaian

kinerja Program Dinas Kesehatan semuanya mengalami peningkatan sebagaimana pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.13**  
**Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2021- 2022**



Selanjutnya penilaian dan evaluasi kinerja secara berjenjang sebagai berikut:

#### **A. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Sumber daya Kesehatan sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	83,43	111,24	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100	105,26	
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	100	Sub Kord Sapras& Alkes
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1	100	Sub Kord Sapras& Alkes
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sub Kord Sapras& Alkes
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	95	95	100	Kabid SDK
<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid SDK
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDM
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	95	98,41	103,59	Kabid SDK
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	624	624	100	SubKord SDM
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord SDM
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid SDK
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100	100	100	SubKord SDM
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	94,81	100,00	105	Kabid SDK
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1	1	100	SubKord Farmasi
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid SDK

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	dokumen	1	1	100	SubKord Farmasi

Berdasarkan capaian kinerja bidang sumber daya kesehatan berada pada 3 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD); Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Dimana capaian semuanya diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang sumber daya kesehatan sebanyak 6 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak satu kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak tiga kegiatan yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada; Program Sediaan Farmasi, Alat



Kesehatan dan Makanan Minuman sebanyak tiga kegiatan yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100% dari target.

Sub substansi sarana prasarana dan alat kesehatan melaksanakan 3 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%. Diantara kegiatan yaitu rehabilitasi dan peningkatan Laboratorium Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan alkes puskesmas.

Sub Substansi Sumber daya manusia kesehatan melaksanakan 5 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sebanyak 3 sub kegiatan dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

Sub substansi Kefarmasian melaksanakan 2 sub kegiatan pada 2 kegiatan yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT) sebanyak 1 sub kegiatan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

## B. Bidang Kesehatan Masyarakat

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.789	17.071	96	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.981	15.929	94	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	78.146	63.482	81	SubKord Kesga& Gizi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Sesuai Standar					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	161.044	91.453	57	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	104.072	50.201	48	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Persen	94,81	100,00	105	Kabid SDK
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid Kesmas



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	1	1	100	SubKord Kesling, Kesja &OR
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen	63,89	68,09	107	Kabid Kesmas
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid Kesmas
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
	Pemberdayaan Masyarakat					
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid Kesmas
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid Kesmas
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	1	100	Sub Kord PKPM

Berdasarkan capaian kinerja bidang kesehatan masyarakat berada pada 3 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD); Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup kesehatan masyarakat sebanyak 6 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



sebanyak satu kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebanyak dua kegiatan yaitu Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebanyak tiga kegiatan yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100% dari target.

Sub substansi kesehatan keluarga dan gizi melaksanakan 6 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana semuanya mencapai 100%.

Sub Substansi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga melaksanakan 5 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 sub kegiatan; kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) sebanyak 1 sub kegiatan; kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan

pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

Sub Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan 3 sub kegiatan pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sub kegiatan, kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat sebanyak 1 sub kegiatan; kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebanyak 1 sub kegiatan dimana semuanya mencapai 100%.

### C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Adapun target dan realisasi kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan	Jumlah	Orang	628.371	499.384	79	SubKord P2

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	231.241	175.321	76	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11.939	19.952	167	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.345	1.845	137	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10.427	13.273	127	SubKord P2 PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	20.367	14.233	70	SubKord P2 PM
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	100	SubKord Survim
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya	dokumen	1	1	100	SubKord Survim

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	100	SubKord P2 PM
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	0	0	100	SubKord P2 PTM

Berdasarkan capaian kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada pada 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 kegiatan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 86,67% dari target.

Sub Substansi surveilans dan imunisasi melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular melaksanakan 3 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melaksanakan 4 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

#### D. Bidang Pelayanan Kesehatan

Adapun target dan realisasi kinerja bidang pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes Primer &Kestrad

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes Primer &Kestrad
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes rujukan & JPK
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	20	20	100	SubKord MPK
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Kabid Yankes
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	20	20	100	SubKord MPK
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	1	1	100	SubKord Yankes rujukan & JPK

Berdasarkan capaian kinerja bidang pelayanan kesehatan berada pada 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 1 kegiatan



meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hasil capaian kegiatan ini diukur dengan meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dimana realisasinya 100 dari target.

Sub Substansi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub Substansi pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub Substansi mutu pelayanan kesehatan melaksanakan 2 sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dimana capaiannya mencapai 100%.

## **E. Sekretariat**

Adapun target dan realisasi kinerja Sekertariat sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	B;	Opini	A	100	Sekretaris
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	80	80,00	100	
<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas Kesehatann evaluasi kinerja dinas	%	75	75	100	Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100	Sub Kord PI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	578	578	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi pegawai pada dinas kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	50	50	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi umum pada Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah pada Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	70	70	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100	Sub Kord PI

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat berada pada 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (yang merupakan program seluruh bidang, sekretariat dan UPTD, dimana semua capaian diatas seratus persen.

Sedangkan jumlah kegiatan dalam lingkup sekretariat Kabupaten/Kota sebanyak 9 kegiatan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 8 kegiatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak 1 kegiatan. Hasil capaian semua kegiatan pada lingkup sekretariat realisasinya 100% dari target.

Sub Substansi program dan informasi melaksanakan 5 sub kegiatan pada 2 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



sebanyak 3 sub kegiatan; dan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi sebanyak 2 sub kegiatan, dimana semuanya mencapai 100%.

Sub bagian keuangan, akunting dan aset melaksanakan 3 sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana capaiannya mencapai 100%.

Sub bagian kepegawaian, umum dan hukum melaksanakan 11 sub kegiatan pada 6 kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebanyak 1 sub kegiatan; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 1 sub kegiatan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 6 sub kegiatan, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 sub kegiatan, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 sub kegiatan, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebanyak 2 sub kegiatan, dimana semuanya mencapai 100%.

## **F. UPTD**

### **1. UPTD Puskesmas**

Adapun target dan realisasi kinerja UPTD Puskesmas sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Ka UPTD
Operasional Pelayanan Puskesmas						
Puskesmas Purwakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Marancang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Mulyamekar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Jatiluhur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Campaka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Bungursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Cibatu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Pasawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Pondoksalam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Wanayasa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Puskesmas Kiarapedes	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Sukatani	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Darangdan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Bojong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Plered	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Tegalwaru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Maniis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Sukasari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Koncara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Munjuljaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Retribusi)						
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Purwakarta)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Bungursari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Sukatani)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Darangdan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Campaka)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Plered)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Tegalwaru)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Mulyamekar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Cibatuh)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi		Penanggung Jawab
				Total	%	
Puskesmas Wanayasa)	Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Pasawahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Jatiluhur)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Munjuljaya)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Maracang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Koncara)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

UPTD Puskesmas terdiri dari 20 Puskesmas memiliki 2 sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya mencapai 100%.

## 2. UPTD Laboratorium Kesehatan

Adapun target dan realisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target			Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
UPTD Laboratorium Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

UPTD Laboratorium Kesehatan berada pada 2 sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan di kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya mencapai 100%.

### 3. UPTD Perbekalan Kesehatan

Adapun target dan realisasi UPTD Perbekalan Kesehatan sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Capaian Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Satuan	Target			Penanggung Jawab
				Total	%	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	95	100	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%	75	75	100	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	100	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
UPTD Perbekalan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	100	Ka Subbag TU UPTD

UPTD Perbekalan Kesehatan berada pada 3 sub kegiatan di kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya mencapai 100%.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Selain indikator sasaran yang menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan. Maka realisasi anggaran juga mempunyai peranan dalam capaian keberhasilan indikator kinerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan dalam mendukung keberhasilan program pelayanan di Dinas Kesehatan. Adapun realisasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Rincian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2022**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>209.625.425.733</b>	<b>182.886.111.491</b>	87,24	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>52.879.633.944</b>	<b>49.929.046.606</b>	94,42	Sekretaris
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54.187.663</b>	<b>53.531.900</b>	98,79	Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.945.300,00	99,78	Sub Kord PI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.908.500,00	99,09	Sub Kord PI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.187.663	18.678.100,00	97,34	Sub Kord PI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>48.979.616.513</b>	<b>46.230.549.627</b>	94,39	Sekretaris
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.934.616.513	46.192.099.265,00	94,40	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	29.999.962,00	100,00	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	8.450.400,00	56,34	Ka Sub BagKeuangan, Akunting dan Aset
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.993.850</b>	99,94	Sekretaris
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.993.850,00	99,94	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.998.000</b>	99,98	Sekretaris
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9998000	99,98	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.720.096</b>	<b>133.372.196</b>	99,74	Sekretaris
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.997.850,00	99,99	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	14.996.600,00	99,98	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.720.096	53.708.746,00	99,98	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.999.000,00	100,00	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000,00	100,00	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	14.670.000,00	97,80	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.403.500</b>	<b>89.925.000</b>	99,47	Sekretaris
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.403.500	89.925.000,00	99,47	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.852.692.172</b>	<b>2.667.978.128</b>	93,52	Sekretaris
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.741.500	471.441.107,00	89,67	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.326.950.672	2.196.537.021,00	94,40	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>749.014.000</b>	<b>733.697.905</b>	97,96	Sekretaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.200.000	39.204.600,00	79,68	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	699.814.000	694.493.305,00	99,24	Ka Sub Bag Kepegawaian, Umum dan Hukum
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>91.020.984.124</b>	<b>76.717.629.198</b>	84,29	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.213.815.785</b>	<b>13.953.986.418</b>	91,72	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.997.244.000	2.741.497.800,00	91,47	Sub Kord Saprass& Alkes
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.000.000	34.915.000,00	99,76	Sub Kord Saprass& Alkes
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.523.357.000	7.826.910.966,00	91,83	Sub Kord Saprass& Alkes
Pengadaan Obat, Vaksin	2.782.091.000	2.475.087.152,00	88,96	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
Pengadaan Bahan Habis Pakai	876.123.785	875.575.500	99,94	Ka Sub Bag TU UPTD Perbekkes
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.662.168.339</b>	<b>62.622.991.030</b>	82,77	Sekretaris. Para Kabid dan Ka UPTD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	269.890.800	269.890.600,00	100,00	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.000.000	15.000.000,00	100,00	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.000.000	14.999.750,00	100,00	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000	15.000.000,00	100,00	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.000.000	14.760.000,00	98,40	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	82.472.700	82.472.700,00	100,00	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000	9.996.000,00	99,96	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000	9.999.750,00	100,00	SubKord P2 PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.000.000	49.999.900,00	100,00	SubKord P2 PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25.000.000	23.949.950,00	95,80	SubKord P2 PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	768.317.450	732.406.350,00	95,33	SubKord Kesga& Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord Kesling, Kesja &OR
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	77.472.700	77.472.400,00	100,00	SubKord Kesling, Kesja &OR
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	10.000.000	9.931.650,00	99,32	SubKord Yankes Primer &Kestrad
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.000.000	15.000.000,00	100,00	SubKord Survim
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	245.472.700	243.908.200,00	99,36	SubKord Yankes Primer &Kestrad
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	17.896.629.132	15.120.609.962,00	84,49	SubKord Survim
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.265.011.500	3.958.170.218,00	92,81	SubKord P2 PM
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.776.901.357	41.861.226.750,00	80,85	SubKord Yankes rujukan & JPK
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	15.000.000	14.999.100,00	99,99	SubKord P2 PTM

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000	39.997.900,00	99,99	SubKord Kesling, Kesja &OR
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.000.000	23.199.850,00	92,80	SubKord MPK
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>90.000.000</b>	<b>89.562.250</b>	99,51	Sekretaris
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.000.000	9.998.250,00	99,98	Sub Kord PI
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	80.000.000	79.564.000,00	99,46	Sub Kord PI
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.000.000</b>	<b>51.089.500</b>	92,89	Kabid Yankes
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	15.000.000	14.999.750,00	100,00	SubKord MPK
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40.000.000	36.089.750,00	90,22	SubKord Yankes rujukan &JPK
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>9.819.515.000</b>	<b>9.665.060.959</b>	98,43	Kabid SDK
<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.999.850</b>	100,00	Kabid SDK
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000	9.999.850,00	100,00	SubKord SDMK
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.799.515.000</b>	<b>9.645.061.109</b>	98,42	Kabid SDK
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord SDMK
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.779.515.000	9.625.061.259,00	98,42	SubKord SDMK
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000	9.999.850,00	100,00	SubKord SDMK
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	100,00	Kabid SDK
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord SDMK
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>506.876.000</b>	<b>494.320.659</b>	97,52	Kabid SDK

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>80.000.000</b>	<b>79.990.400</b>	99,99	Kabid SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.000.000	79.990.400,00	99,99	SubKord Farmasi
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>406.876.000</b>	<b>404.330.259</b>	99,37	Kabid SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	406.876.000	404.330.259,00	99,37	SubKord Farmasi
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	100,00	Kabid Kesmas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord Kesling, Kesja &OR
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	100,00	Sekretaris
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	SubKord Kesling, Kesja &OR
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>171.209.050</b>	<b>167.807.100</b>	98,01	Kabid Kesmas
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>39.999.650</b>	100,00	Kabid Kesmas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.000.000	39.999.650,00	100,00	Sub Kord PKPM
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>116.209.050</b>	<b>112.808.650</b>	97,07	Kabid Kesmas
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	116.209.050	112.808.650,00	97,07	Sub Kord PKPM
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.998.800</b>	99,99	Kabid Kesmas
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.000.000	14.998.800,00	99,99	Sub Kord PKPM
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.251.822.865</b>	<b>45.321.425.789</b>	<b>83,54</b>	<b>Ka UPTD</b>
Operasional Pelayanan Puskesmas	53.366.847.865	44.454.401.438	83,30	UPTD Puskesmas
Puskesmas Purwakarta	2.397.818.632	1.884.311.293	78,58	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Marancang	1.730.751.228	1.460.925.379	84,41	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Mulyamekar	1.734.203.574	1.405.559.250	81,05	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Jatiluhur	2.735.481.466	2.443.343.199	89,32	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Campaka	2.915.580.573	1.901.423.449	65,22	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Bungursari	1.794.188.990	1.498.677.673	83,53	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Cibatu	2.386.014.031	1.798.801.313	75,39	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Pasawahan	2.638.724.444	2.093.945.276	79,35	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Pondoksalam	2.034.870.796	1.795.917.638	88,26	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Wanayasa	3.061.638.842	2.770.084.971	90,48	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Kiarapedes	2.085.748.846	2.016.144.730	96,66	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Sukatani	3.732.592.579	3.319.171.803,00	88,92	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Darangdan	3.801.704.180	3.709.282.062	97,57	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Bojong	3.272.664.285	2.536.285.283	77,50	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Plered	4.306.326.753	3.640.843.189	84,55	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Tegalwaru	4.216.169.786	3.249.453.705	77,07	Ka Subbag TU UPTD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Puskesmas Maniis	2.962.151.434	2.343.336.882,00	79,11	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Sukasari	1.751.699.760	1.354.483.874	77,32	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Koncara	1.718.184.130	1.381.891.716	80,43	Ka Subbag TU UPTD
Puskesmas Munjuljaya	2.090.333.536	1.850.518.753	88,53	Ka Subbag TU UPTD
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	884.975.000	867.024.351	97,97	
UPTD Perbekalan Kesehatan	184.975.000	184.856.685	99,94	Ka Subbag TU UPTD
UPTD Laboratorium Kesehatan	700.000.000	682.167.666	97,45	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Retribusi)	975.384.750	590.821.180	60,57	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Purwakarta)	205.026.000	140.330.075	68,45	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Bungursari)	51.484.500	37.524.600	72,89	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Sukatani)	6.098.250	0	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Darangdan)	507.000	0	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Campaka)	5.552.250	5.552.250	100,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Plered)	143.086.500	35.836.580	25,05	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Tegalwaru)	48.796.500	44.186.675	90,55	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Mulyamekar)	161.902.500	112.948.650,00	69,76	Ka Subbag TU UPTD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	REALISASI		Penanggung Jawab
		Rp	%	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Cibatu)	36.994.500	0	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Wanayasa)	14.682.000	0	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Pasawahan)	24.284.250	-	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan)	165.375.000	163.436.350	98,83	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Jatiluhur)	49.311.000	49.311.000	100,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Munjuljaya)	47.394.750	0,00	0,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Maracang)	2.118.750	1.695.000,00	80,00	Ka Subbag TU UPTD
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Koncara)	12.771.000	0	0,00	Ka Subbag TU UPTD

Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp 209.625.425.733 terdiri dari APBD Kabupaten, DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dimana realisasi anggaran sebesar 87,24%. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi khususnya BOK Puskesmas dan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang belum optimal. Perubahan BOK Puskesmas adanya perubahan juknis seperti mengubah kegiatan penanganan covid menjadi insentif tenaga Kesehatan, dimana realisasinya belum optimal. Sedangkan BLUD masih dalam tahap belajar, sehingga perlu



dukungan dari semua pihak, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sehingga lebih berkembang, kompetitif dan inovatif dengan tetap fokus peningkatan pelayanan yang berkualitas.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kesehatan. LAKIP tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LAKIP tahun 2021 menggunakan metoda yang berdasarkan pada pencapaian sasaran dengan menggunakan analisa dari indikator sasaran.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup kesehatan menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak periode 2018 hingga 2023. Dari hasil analisis terhadap sasaran dan program diperoleh gambaran yang menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut :

- 1) Sasaran tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana berdasarkan indikator yaitu umur harapan hidup, dimana targetnya sebesar 70,68 dengan menunggu hasil resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta,



- dimana target tersebut diperikarakan dapat tercapai sehingga persentasenya bisa menjadi 100%.
- 2) Sasaran Dinas Kesehatan sebagai turunan dari tujuan kesehatan yaitu **Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas**, dimana berdasarkan indikator utama indikator persentase kematian ibu belum mencapai target, sedangkan persentase kematian bayi telah melampaui target dengan capaian diatas 100%.
  - 3) Sasaran program menunjukkan terdapat 7 indikator dan 5 program. Berdasarkan indikator menunjukkan semua indikator telah mencapai target. Hal ini menjadi bagaimana meningkatkan capaian target semakin tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat.
  - 4) Secara umum meskipun target telah tercapai, namun masih tetap tidak berpuas diri karena masih adanya kekurangan termasuk kebutuhan untuk tenaga Kesehatan dan non kesehatan yang kompetitif dan professional sehingga dapat mendorong perubahan capaian yang lebih tinggi sehingga dapat mempermudah mencapai tujuan organisasi Dinas Kesehatan tyaitu meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta dukungan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal bidang kesehatan.
  - 5) Pada sisi lain penanganan Covid-19 termasuk kejadian luar biasa Standar pelayanan minimal bidang kesehatan kewenangan Provinsi sehingga perlu dukungan dan pendanaan yang lebih besar dari tingkat Provinsi



Dari hasil analisis secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta harus diarahkan pada sebesar-besarnya upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan untuk menurunkan Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya preventif dan promotif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan tujuan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Perlu diperhatikan pula para penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya serta menjalin kemitraan dengan badan lain di tingkat nasional maupun internasional agar lebih banyak dana yang dapat dimobilisasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

Peran serta masyarakat perlu pula dikaji secara lebih mendalam tentang potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Selanjutnya perlu pula diperhatikan bahwa capaian kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan pada tahun 2021 ini, karena masih banyak yang perlu dibenahi dan harus dijadikan umpan balik bagi seluruh jajaran pegawai kesehatan di tingkat kabupaten dan jaringannya seperti puskesmas, laboratorium kesehatan dan perbekalan kesehatan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Dinas Kesehatan yang telah kita sepakati bersama.